

**TANGGUNG JAWAB PEMEGANG IZIN USAHA  
PERTAMBANGAN DALAM KEGIATAN REKLAMASI  
TAMBANG**

**SKRIPSI**



OLEH:

JULIANUS MARCOS DHAE NDOY

NPM: 18300132

**UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA  
FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA  
2024**

**TANGGUNG JAWAB PEMEGANG IZIN USAHA  
PERTAMBANGAN DALAM KEGIATAN REKLAMASI  
TAMBANG**

**SKRIPSI**

UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN GUNA MEMPEROLEH GELAR  
SARJANA HUKUM PADA PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA



OLEH:

JULIANUS MARCOS DHAE NDOY

NPM: 18300132

**UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA  
FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA  
2024**

**TANGGUNG JAWAB PEMEGANG IZIN USAHA  
PERTAMBANGAN DALAM KEGIATAN REKLAMASI  
TAMBANG**

**SKRIPSI**

UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN GUNA MEMPEROLEH GELAR  
SARJANA HUKUM PADA PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA



OLEH:

JULIANUS MARCOS DHAE NDOY

NPM: 18300132

SURABAYA, 13 FEBRUARI 2024

MENGESAHKAN,

DEKAN,

PEMBIMBING,

**Dr. UMI ENGGASARI, S.H., Mum**

**Dr. ENDANG RETNOWATI, S.H., M.Hum**

**TANGGUNG JAWAB PEMEGANG IZIN USAHA  
PERTAMBANGAN DALAM KEGIATAN REKLAMASI  
TAMBANG**

DIPERSIAPKAN DAN DISUSUN

Oleh




JULIANUS MARCOS DEHMANDOY

NPM 18300132

JELAH DIPERLIHANKAN

DI DEPAN DEWAN PENGUJI PADA TANGGAL 1 FEBRUARI 2024  
DAN DINYATAKAN TELAH MEMENUHI PERSYARATAN

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

- |                                       |           |   |
|---------------------------------------|-----------|---|
| 1. SETO CAHYONO, S.H., M.Hum.         | (KETUA)   | 1.....<br> |
| 2. NOOR TRI HASTUTI, S.H., M.Hum.     | (ANGGOTA) | 3.....<br> |
| 3. Dr. ENDANG RETNOWATI, S.H., M.Hum. | (ANGGOTA) | 2.....<br> |

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat rahmat dan karunia-nya, sehingga skripsi yang berjudul “TANGGUNG JAWAB PEMEGANG IZIN USAHA PERTAMBANGAN DALAM KEGIATAN REKLAMASI TAMBANG” dapat diselesaikan dengan baik.

Berkenaan dengan penyelesaian penulisan skripsi ini, penulis ingin menghaturkan terima kasih untuk segala dukungan, motivasi, arahan, dan semangat kepada:

1. Rektor Universitas Wijaya Kusuma Surabaya Prof. Dr. H. Widodo Ario Kentjono, dr. Sp. THT-KLM, FICS yang telah memberi saya kesempatan untuk menjadi bagian dari Civitas Akademika.
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, Dr. Hj. Umi Enggasari, S.H., M.Hum. yang telah menyediakan berbagai fasilitas sebagai penunjang pembelajaran selama saya mengikuti perkuliahan.
3. Dr. Endang Retnowati, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing yang dengan penuh kesabaran telah meluangkan waktu untuk memberi memberi pengarahan dan pengetahuan selama menyelesaikan skripsi ini.
4. Seto Cahyono, S.H., M. Hum dan Noor Tri Hastuti, S.H., M. Hum selaku dosen yang turut membantu dalam memberikan penjelasan terhadap skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah memberikan pengetahuan ilmu hukum dengan baik selama penulis mengikuti perkuliahan.
6. Orang tua dan segenap keluarga besar saya yang senantiasa memberikan dukungan serta semangat.
7. Keluarga Besar Komunitas Peradilan Semu Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang memberikan saya pengetahuan tentang ilmu hukum dan pengalaman berorganisasi.

8. Teman-teman serantau saya yang saling mendukung dalam menjalani masa perkuliahan.

Demikian saya mengucapkan terima kasih dan saya sebagai penulis memohon maaf apabila terdapat kekurangan. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Hormat saya,

Penulis

Julianus Marcos Dhar Ndoy

## SURAT PERNYATAAN ORISINILITAS

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Julianus Marcos Dhae Ndoy  
NPM : 18300132  
Alamat : Jl. Duku Kupang XXX No. 70, Surabaya  
No. Telp (HP) : 081234825560

Menyatakan bahwa penelitian saya yang berjudul “TANGGUNG JAWAB PEMEGANG IZIN USAHA PERTAMBANGAN DALAM KEGIATAN REKLAMASI TAMBANG” adalah murni gagasan yang belum saya publikasikan di media, baik majalah maupun jurnal ilmiah dan bukan tiruan (plagiat) dari karya orang lain.

Apabila ternyata nantinya ditemukan adanya unsur plagiarisme maupun autoplagiarisme, saya siap menerima sanksi akademik yang akan dijatuhkan oleh fakultas.

Demikian pernyataan ini saya buat sebagai bentuk pertanggungjawaban etika akademik yang harus dijunjung tinggi di lingkungan Perguruan Tinggi.

Surabaya, 1 Februari 2024

Yang Menyatakan,



**JULIANUS MARCOS DHAE NDOY**

NPM: 18300132

## ABSTRACT

*The research entitled “Responsibility of Mining Business Licences Holders in Mining Reclamation Activities” aims firstly to explain reclamation and post-mining according to statutory regulation. Secondly, to explain the forms of responsibility of explain the forms of responsibility of mining reclamation activities. The research is conducted using a statutory approach where the writing of this thesis is normative legal research method. The research is conducted using a statutory approach where the writing of this thesis examines laws and regulations.*

*Based on the research results, it can be concluded that the obligation of reclamation on former mining land is regulated in Law Number 4 of 2009 concerning Minerals and Coal. Meanwhile, further guidance on reclamation and post-mining is regulated in Government Regulation Number 78 of 2010 concerning Reclamation and Post-mining and Minister of Energy and Mineral Resources of Energy and Mineral Resources of Republic of Indonesia Decision No.1827 K/30/MEM/2018 concerning Guidelines for the Implementation of Good Mining Technical Principles.*

*The provisions of these regulations systematically explain the forms of responsibility of IUP/IUPK holders that must be fulfilled in the implementation of reclamation and post-mining. These responsibilities include the preparation of reclamation plans and post-mining plans, the provision of reclamation guarantees and post-mining guarantees, implementation of reclamation and post-mining, and the provision of reclamation land and post-mining land. In addition to being responsible for fulfilling these obligations, IUP/IUPK holders in the production operation stage before relinquishing or returning WIUP/WIUPK are required to carry out reclamation and post-mining until reaching a success rate of one hundred percent. The government needs to establish new implementing regulation that contain detailed implementations that details of the exiting norms in the Mining Law so that the Mining Law can be optimally beneficial.*

**Keywords:** *Reclamation and post-mining, Mining Law, and responsibility*



## ABSTRAK

Penelitian yang berjudul Tanggung Jawab Pemegang Izin Usaha Pertambangan Dalam Kegiatan Reklamasi Tambang bertujuan pertama untuk menjelaskan reklamasi dan pascatambang menurut peraturan perundang-undangan. Kedua untuk menjelaskan bentuk tanggung jawab pemegang izin usaha pertambangan dalam kegiatan reklamasi tambang. Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini yakni metode penelitian hukum normatif. Penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dimana penulisan skripsi ini menelaah undang-undang dan regulasi.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa kewajiban reklamasi pada lahan bekas tambang diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara. Petunjuk dan mekanisme pelaksanaan reklamasi dan pascatambang tidak secara jelas ditegaskan dalam ketentuan penutup Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara sehingga UU Minerba belum memiliki aturan pelaksana yang jelas. Dalam mengatasi terjadi kekosongan hukum dalam prosedur atau pelaksanaan UU minerba, maka sesuai doktrin hukum yang berlaku, pelaksanaan UU Minerba mengikuti Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang dan Keputusan Menteri ESDM Republik Indonesia No.1827 K/30/MEM/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan yang Baik.

Ketentuan peraturan tersebut menjelaskan secara sistematis bentuk tanggung jawab pemegang IUP/IUPK yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan reklamasi dan pascatambang. Pemerintah perlu mengganti Peraturan Pemerintah Nomor 78 tentang Reklamasi dan Pascatambang dengan Peraturan Pemerintah baru yang disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara untuk memberikan kejelasan, mencegah pelanggaran dalam penerapan UU Minerba, serta tidak terjadi penafsiran-penafsiran liar dalam prosedur atau pelaksanaan UU Minerba.

**Kata Kunci:** reklamasi dan pascatambang, UU Minerba, dan tanggung jawab.

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	I
HALAMAN PENGESAHAN.....	II
HALAMAN PERSETUJUAN.....	III
KATA PENGANTAR .....	IV
SURAT PERNYATAAN ORISINILITAS.....	VI
<i>ABSTRACT</i> .....	VII
ABSTRAK .....	VIII
DAFTAR ISI.....	IX
BAB I PENDAHULUAN.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
1. Latar Belakang.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
2. Rumusan Masalah .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
3. Tujuan Penulisan .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
4. Manfaat Penelitian.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
5. Kerangka Konseptual.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
6. Metode Penelitian.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
7. Pertanggung jawaban Sistematika.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>

**BAB II PENGATURAN REKLAMASI DAN PASCATAMBANG MENURUT  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN****Error! Bookmark not  
defined.**

1. Dasar Hukum Reklamasi dan Pascatambang .....**Error! Bookmark not defined.**
2. Penyelenggaraan Reklamasi dan Pascatambang .....**Error! Bookmark not defined.**
3. Sanksi terhadap Pelanggaran Kegiatan Reklamasi dan Pascatambang.....**Error!  
Bookmark not defined.**

**BAB III TANGGUNG JAWAB PEMEGANG IZIN USAHA PERTAMBANGAN  
DALAM KEGIATAN REKLAMASI TAMBANG****Error! Bookmark not  
defined.**

1. Penyusunan Rencana Reklamasi dan Rencana Pascatambang....**Error! Bookmark  
not defined.**
2. Penyediaan dan Penempatan Jaminan Reklamasi dan Pascatambang .....**Error!  
Bookmark not defined.**
3. Pelaksanaan dan Pelaporan Reklamasi dan Pascatambang .. **Error! Bookmark not  
defined.**
4. Penyerahan Lahan .....**Error! Bookmark not defined.**

**BAB IV PENUTUP** ..... **Error! Bookmark not defined.**

1. Kesimpulan .....**Error! Bookmark not defined.**
2. Saran.....**Error! Bookmark not defined.**

DAFTAR BACAAN..... **Error! Bookmark not defined.**

